

**PENERAPAN PROGRAM PORTAL SATU DATA UNTUK MENINGKATKAN  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH**  
(Studi di: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur)

Ubaid Is Nur Rosyid Prasetyo  
NPP. 29.0997

*Asdaf Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: Isnurrosyid@gmail.com

**ABSTRACT**

The author focuses on the problem that the government is currently trying to create a more transparent and accountable government in the new era of the trend of information disclosure by utilizing information technology to simplify and adapt the existing era. **Purpose:** The purpose of this study was to find out and analyze how the application of the One Data Portal in Bojonegoro Regency to increase transparency and accountability of the Regional Government carried out by the Communication and Information Office of Bojonegoro Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the application theory of Maskun in Labolo. Data collection techniques using in-depth interviews (5 informants), documentation and observation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that there is still infrastructure in the form of Network System Speed that needs to be improved again and there are still people who do not know about One Data Bojonegoro. **Conclusion:** The application of One Bojonegoro Data by Diskominfo Bojonegoro Regency is not optimal, in its application the community still does not fully know it. Even though there are several obstacles, the efforts that have been made by the government in overcoming these obstacles are the establishment of the Bojonegoro Regency One Data Forum, Coordination Meeting activities have been carried out, and training activities for operators and/or officials of PD and Village data and information management have been carried out. has carried out socialization to the people of Bojonegoro.

**Keywords:** E-Government, One Bojonegoro Data, One Indonesia Data e

**ABSTRAK**

Penulis berfokus pada permasalahan pemerintah pada saat ini sedang berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel pada era baru trend keterbukaan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mempermudah serta menyesuaikan zaman yang ada. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Portal Satu Data di Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan

pendekatan induktif dan analisis terhadap teori penerapan dari Maskun dalam Labolo. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (5 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Masih ada infrastruktur berupa Kecepatan Sistem Jaringan yang perlu ditingkatkan lagi serta masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang Satu Data Bojonegoro. **Kesimpulan:** Penerapan Satu Data Bojonegoro oleh Diskominfo Kabupaten Bojonegoro belum optimal, dalam penerapannya masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahuinya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan adanya pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Bojonegoro, dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi, dan telah dilaksanakan kegiatan pelatihan operator dan/ atau pejabat pengelola data dan informasi PD dan Desa, Diskominfo juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bojonegoro.

**Kata kunci:** E- Government, Satu Data Bojonegoro, Satu Data Indonesia

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi juga telah berkembang dengan cepat untuk mempermudah pekerjaan manusia, salah satu bentuk dari teknologi informasi yang banyak digunakan adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer global dengan fungsi penting yaitu sebagai media informasi telekomunikasi, perdagangan online dan sebagainya. Indonesia termasuk kedalam negara yang penduduknya banyak menggunakan internet. Awal tahun 2021, pengguna Internet di Indonesia telah melampaui angka 202,6 juta. Dibanding pada Januari 2020, jumlah tersebut telah meningkat 15,5% atau 27 juta orang. Indonesia saat ini memiliki penduduk dengan jumlah 274,9 juta jiwa. Artinya, pada awal tahun 2021, tingkat penetrasi internet Indonesia telah mencapai 73,7%.

Kemajuan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan, sebab kemajuan teknologi akan terus berjalan seiring dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan yang ada, kemampuan sumber daya manusia juga harus ditingkatkan guna menyesuaikan diri. Begitu pula dalam sistem pemerintahan, saat ini pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.

Pemerintah dalam menanggapi tuntutan yang ada terdorong untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik biasa disebut dengan good governance. Indikator dari good governance salah satunya adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan pemerintahan menjadi trend baru di era reformasi serta merupakan faktor penting dalam pelaksanaan good governace. Keterbukaan informasi dalam pelaksanaannya memerlukan adanya pemanfaatan teknologi informasi guna dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. E-Government yang biasa disebut pemerintahan berbasis elektronik merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pelaksanaan pemerintahan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

Bentuk pelaksanaan e-Government dan pelayanan keterbukaan informasi publik salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI). SDI adalah kebijakan pengelolaan data pemerintah yang memiliki tujuan untuk menciptakan data berkualitas tinggi yang dapat dengan mudah diakses dan dibagikan antara organisasi pusat dan daerah. Lebih lanjut dijabarkan bahwa SDI merupakan kebijakan pengelolaan data oleh pemerintah yang dirancang untuk memperoleh Data yang mutakhir, terpadu, akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Interoperabilitas Data, Metadata serta menggunakan Data Induk dan Kode Referensi.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Portal Satu Data Bojonegoro (SDB) yaitu sebelum adanya aplikasi ini masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi khususnya terkait pemerintahan. Selain itu masyarakat harus datang ke kantor atau dinas tertentu terlebih dahulu sehingga cukup menguras waktu, tenaga serta biaya. Dengan adanya informasi yang kurang kepada masyarakat sehingga menimbulkan kondisi dimana masyarakat kurang berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Masyarakat banyak yang begitu paham terkait apa saja yang menjadi isu ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Namun setelah diterapkannya program dari aplikasi Portal Satu Data Bojonegoro ini masih ada beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki kualitas jaringan internet yang tidak sebagus di daerah pusat pemerintahan. Hal ini dapat dikatakan bahwa kualitas jaringan internet di Bojonegoro masih belum merata, namun sejauh ini belum ada perbaikan yang memberikan perubahan signifikan terhadap kecepatan jaringan di Bojonegoro. Dengan adanya hal tersebut berdampak pada penerapan Portal Satu Data Bojonegoro yang belum optimal. Kemudian dilingkungan masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait aplikasi ini. Hal tersebut diakibatkan beberapa masalah yang merasa belum begitu membutuhkan informasi yang tersedia dalam aplikasi ini.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan Implementasi Open Data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian Fetty Wiyani, Muhammad Ery Wijaya, Ani Adiwinata Nawir (2019) berjudul Studi Analisis Implementasi Open Data Untuk Meningkatkan Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menemukan bahwasannya dalam pelaksanaan Open Data di DKI Jakarta belum maksimal. Hal tersebut diakibatkan akibat kelembagaan masih terlalu kaku untuk mengadopsi struktur vertikal, sehingga tanggung jawab kelembagaan dan arah kebijakan disesuaikan dengan arah vertikal, yang tidak cocok karena kolaborasi membutuhkan kerja atau organisasi horizontal.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Nur Afiah Maizunati (2018) yang berjudul Implementasi Data Sektoral Terbuka Dalam Mendukung Smart Governance di Kota Magelang, Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi portal data di Kota Magelang dinilai sudah cukup baik, namun adanya bounce rate (persentase pengunjung yang langsung meninggalkan website setelah membuka satu halaman saja) yang tinggi dan rata-rata waktu akses yang rendah perlu diperhatikan demi optimalnya kepuasan pengguna. Kualitas bahan portal harus ditingkatkan dengan tetap menjaga validitas data yang tersedia untuk umum dan meningkatkan partisipasi aktif dari pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun data terbuka yang komprehensif, representasi, ramah pengguna dan aman.

Penelitian berikutnya yaitu dari Krisdianto (2021) yang berjudul Penerapan Aplikasi Klampid Bagi Penduduk Pindah Datang di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang berkesimpulan bahwasannya penerapan aplikasi klampid masih belum maksimal. Permasalahan yang ada di Surabaya saat ini mengenai Aplikasi Klampid pembuatan dokumen administrasi kependudukan secara online atau daring adalah belum semua masyarakat di Kota

Surabaya siap mengoperasikan IT dalam kepengurusan semua 8 dokumen administrasi kependudukan melalui online (daring). Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat belum bisa mengoperasikan smartphone dan komputer untuk kepengurusan dokumen kependudukan secara online. Kebanyakan orang tua malas belajar menggunakan smartphone dan komputer padahal untuk belajar mengoperasikan benda tersebut sangatlah mudah tetapi para orang tua saja yang malas untuk mempelajarinya. Bukan hanya tidak bisa mengoperasikan Handphone dan komputer tersebut tetapi kebanyakan masyarakat terutama orang tua di Kota Surabaya masih belum memiliki fasilitas tersebut. Memiliki benda-benda berteknologi tersebut saja tidak apalagi mengetahui cara pengoperasiannya.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus permasalahan ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Portal Satu Data di Kabupaten Bojonegoro, kemudian teori analisis yang dipakai berbeda dan tempat lokasi penelitian pun dilakukan pada Diskominfo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Berbeda dari Fetty Wiyani, Muhammad Ery Wijaya, Ani Adiwinata Nawir (2019), Nur Afiah Maizunati (2018) maupun Krisdianto (2021). Selain itu Portal Satu Data Bojonegoro ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait dengan pemerintahan.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Portal Satu Data Bojonegoro untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Portal Satu Data Bojonegoro. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Kepala Bidang Layanan E-Government Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Admin pengelola Portal Satu Data Bojonegoro dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Penerapan Portal Satu Data Bojonegoro sebagai layanan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur menggunakan teori dari Maskun dalam Labolo. Teori tersebut memiliki 4 dimensi dalam mengukur Penerapan yang baik yaitu Penerapan yang berorientasi pada kebijaksanaan, Penerapan yang berorientasi pada lingkungan, Penerapan dengan berorientasi pada kemajuan teknologi, Penerapan dengan berorientasi pada legislasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

### 3.1. Penerapan yang berorientasi pada kebijaksanaan

Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan misi kedua pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018–2023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab”, sekaligus melaksanakan program unggulan ke-14 yaitu “Bojonegoro *Green* dan *Smart City*”. Hal ini tentu selaras dengan pelaksanaan SDB guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi memanfaatkan teknologi informasi dan sarana guna mewujudkan *smart city*.

**17 Program Unggulan kabupaten Bojonegoro**

1. Perbaikan Jalan, Jembatan dan Infrastruktur dan PJU
2. KPM ( Kartu Petani Mandiri ) Plus
3. Mendukung Pengaturan Madrasah Diniyah Melalui Inisiasi Perda Madin
4. Sekolah Gratis SD, SLTP, SLTA
5. 100 Ribu Lapangan Kerja Baru
6. Tambahn Insentif GTT dan PTT
7. Program Aladin (Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Rumah Pra Sejahtera )
8. Modal Umkm 100 Juta Untuk Bumdes dan 10 Juta
1. Perbaikan Jalan, Jembatan dan Infrastruktur dan PJU
2. KPM ( Kartu Petani Mandiri ) Plus
3. Mendukung Pengaturan Madrasah Diniyah Melalui Inisiasi Perda Madin
4. Sekolah Gratis SD, SLTP, SLTA
5. 100 Ribu Lapangan Kerja Baru
6. Tambahn Insentif GTT dan PTT
7. Program Aladin (Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Rumah Pra Sejahtera )
8. Modal Umkm 100 Juta Untuk Bumdes dan 10 Juta Untuk Setiap RT
9. Merevisi Perbup Nomor 35 Tahun 2015 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
10. Lingkungan Ramah Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas Serta Kaum Dhuafa
11. Kesehatan Meliputi Layanan Puskesmas 24 Jam. Memperkuat Polindes. Gizi Tambahn Untuk Ibu Hamil dan Menyusui
12. Kenaikan Honor Rt/Rw 100% Setiap Bulan
13. Santunan Duka 2.5 Juta
14. Bojonegoro Green dan Smart City
15. Kemudahan Perizinan dan Investasi Satu Atap
16. Festival Tahunan Budaya Bojonegoro
17. Penataan Pasar Tradisional

Sumber : Renstra kabupaten Bojonegoro, 2018-2023

Strategi kabupaten Bojonegoro dalam penerapan SDB yang adalah dengan telah dibuat Peraturan Bupati tentang SDB, dibentuknya Forum SDB dan telah dilakukannya rapat koordinasi SDB. Selain itu yang telah dilakukan adalah dengan memperbaiki dan menyiapkan infrastruktur. Selain dari perbaikan infrastruktur, Diskominfo memiliki strategi dengan membuat kegiatan pelatihan operator dan/ atau pejabat pengelola data dan informasi PD dan desa. Hal ini merupakan salah satu upaya awal guna memperkenalkan, melatih dan menyamakan prinsip terkait pelaksanaan SDB baik dari jenis data, indikator ataupun susunan data bagi operator dan/ atau pejabat pengelola data dan informasi PD dan desa.



Sumber : Diskominfo Bojonegoro, 2020

Sosialisai ke masyarakat juga merupakan bentuk strategi yang dilakukan oleh Diskominfo maupun Pemerintah Bojonegoro untuk memperkenalkan SDB. Media yang digunakan mulai dari media sosial Instagram Diskominfo, baliho, maupun dengan terjun langsung ke desa untuk sosialisasi ke masyarakat. Hal ini menjadi salah satu perhatian penting dalam penerapan SDB, sebab masyarakat merupakan target pemerintah dari pelayanan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan Diskominfo telah melaksanakan tugas dengan baik. Kominfo telah membuat dan melaksanakan strategi dalam penerapan SDB dengan memberikan kegiatan pelatihan operator dan/ atau pejabat pengelola data dan informasi PD dan desa. Diskominfo juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Bojonegoro.

### **3.2. Penerapan yang berorientasi pada lingkungan**

Keadaan Wilayah dalam dimensi ini diartikan sebagai lingkungan yang membentuk karakter dalam kehidupan masyarakat. Faktor lingkungan yang mempengaruhi penerapan SDB ialah geografis dan topografi. Kedua faktor ini kemudian berpengaruh pada demografi penduduk pada aspek mata pencaharian penduduk yang selanjutnya mempengaruhi penerapan SDB.

Bojonegoro merupakan kabupaten dengan wilayah cukup luas yang dialiri oleh sungai bengawan solo. Selain itu, Bojonegoro memiliki rata-rata curah hujan cukup tinggi setiap tahun. Dengan begitu, Bojonegoro termasuk kedalam daerah yang subur dengan wilayah yang luas. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat Bojonegoro bekerja sebagai petani.

Pekerjaan masyarakat Bojonegoro cukup berpengaruh apabila dikaitkan dengan penerapan SDB. Meskipun sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten maupun Diskominfo sendiri sudah dilaksanakan. Terdapat masyarakat yang masih belum sepenuhnya tahu dan mengerti tentang SDB. Karena, sebagian masyarakat yang bekerja sebagai petani merasa tidak begitu memerlukan informasi yang ada pada situs ini sehingga SDB kurang dipedulikan dan banyak masyarakat tidak mengetahuinya.

Hasil wawancara dan observasi didapatkan bahwa program SDB menguntungkan bagi masyarakat mulai dari segi biaya, waktu dan juga tenaga. karena masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan dengan begitu otomatis akan mengurangi biayanya, selain itu belum tentu semua orang mempunyai waktu untuk datang meminta suatu data/informasi, tetapi dengan adanya Aplikasi satu data ini bisa menghemat waktu seseorang. Hemat tenaga juga merupakan keuntungan masyarakat Kabupaten Bojonegoro karena tidak perlu datang capek-capek ke kantor pelayanan untuk memperoleh suatu informasi seputar pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dan cukup mengaksesnya melalui situs yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat ditarik

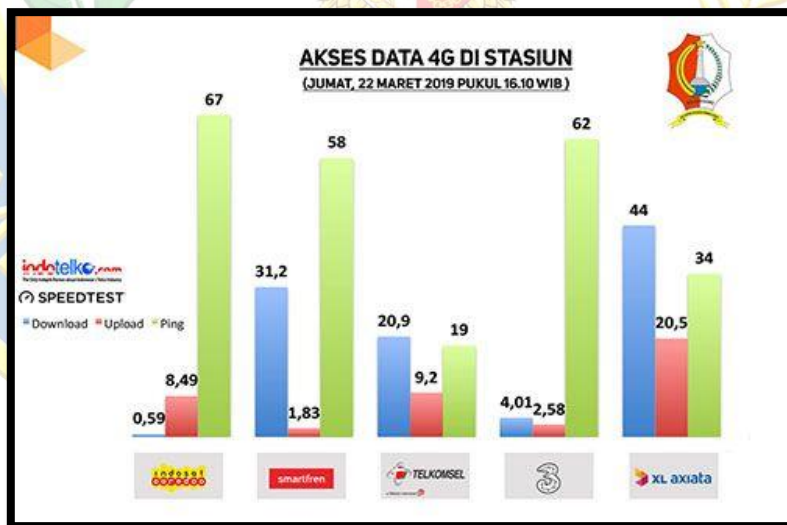
kesimpulan program SDB menguntungkan bagi masyarakat mulai dari segi biaya, waktu dan juga tenaga meskipun belum dari semua masyarakat Bojonegoro mengetahui Portal SDB.

### 3.3. Penerapan dengan berorientasi pada kemajuan teknologi

Faktor teknologi harus diperhatikan dalam membangun pemerintahan. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Diskominfo dapat dianalisis bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah cukup untuk terselenggaranya SDB. Pada tahun 2020 Pemerintah Bojonegoro telah melaksanakan kerjasama terhadap beberapa penyedia layanan provider internet untuk dapat meningkatkan kualitas jaringan di Kabupaten Bojonegoro. Kerjasama tersebut dibuktikan dengan hasil dari tes dari pengujian jaringan internet (4G) pada beberapa titik di Kabupaten Bojonegoro.



Sumber: <https://www.indotelko.com>



Sumber: <https://www.indotelko.com>



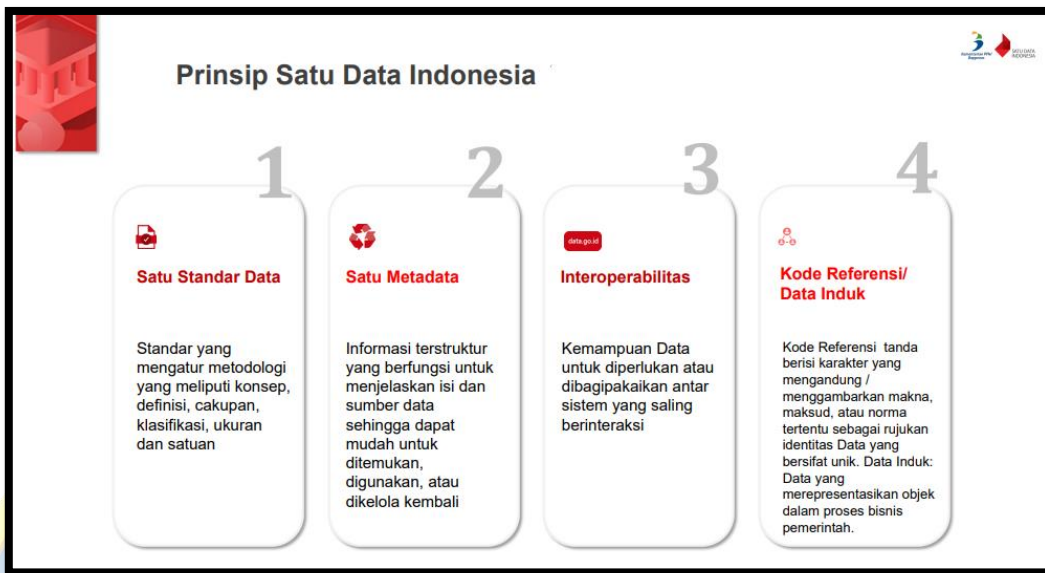
Sumber: <https://www.indotelko.com>

Pengujian tersebut didapatkan data bahwa sinyal 4G lima operator sudah menyelimuti Kabupaten Bojonegoro dengan kecepatan yang sudah cukup bagus. Hanya saja, terdapat beberapa operator kurang begitu merata penyebarannya sehingga kecepatan datanya agak tidak begitu stabil. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji pada tiga titik diatas yang menunjukkan hasil beragam. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan dalam dimensi ini pelaksanaan SDB masih belum maksimal. Meskipun Diskominfo sudah berupaya menyiapkan sarana dan prasarana guna pelaksanaan SDB dengan baik, namun infrastruktur jaringan masih belum merata di seluruh daerah Bojonegoro sehingga kecepatan datanya agak tidak begitu stabil sehingga kecepatan datanya agak tidak begitu stabil.

### 3.4. Penerapan dengan berorientasi pada legislasi

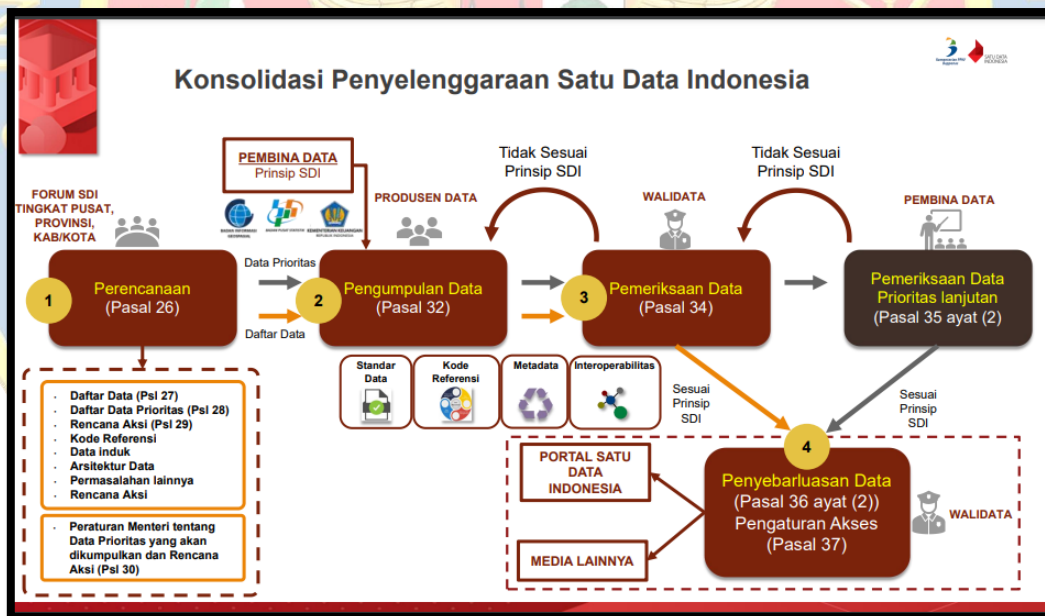
Legalisasi perlu adanya untuk menunjukkan keabsahan dan kepastian hukum dari SDB. Legalisasi dimaknai sebagai suatu pengesahan secara tertulis yang dibuat oleh pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah. Dalam penerapan SDB legislasinya berupa Undang-undang, Perpres maupun Perbub terkait SDB. Legislasi tersebut sekaligus menjadi pedoman dan tuntunan dalam terselenggaranya SDB.





Sumber: Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Prinsip merupakan suatu pernyataan umum yang bersifat kebenaran fundamental. Prinsip disini digunakan sebagai pedoman paling dasar dalam penyelenggaraan SDI yang kemudian secara terpadu dilaksanakan dalam SDB. Terdapat 4 prinsip dalam SDI yaitu satu standar data, satu metadata, interoperabilitas, dan kode referensi/ data induk.



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Pedoman penyelenggaraan SDI juga telah dijelaskan dalam Perpres yang menjadi legalitas penerapannya. Sesuai gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan SDI dimulai dari tahap perencanaan hingga penyebarluasan data. Hal itu kemudian menjadi pedoman bagi pelaksanaan SDB.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan dalam menghimpun data SDB mengacu penyelenggaraan SDI secara terpadu yang disesuaikan dan diawali perencanaan data oleh produsen data. Pada perumusan yaitu masing-masing unit kerja (Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan terhadap data tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan adalah membuat susunan data-data, merumuskan data prioritas yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



Sumber: Diskominfo Kabupaten Bojonegoro, 2020

Pemerintah kabupaten Bojonegoro mengacu RPJMD dan mengacu 17 program unggulan. Renaksinya adalah membedah masing-masing kegiatan itu yang dibuat timeline termasuk target-target tahunannya, bagaimana mewujudkan pengelola data tersebut. Kemudian referensi data induk dan lainnya. Setelah perencanaan data maka dikumpulkan dari produsen data sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan dikumpulkan pada wali data Dinas Kominfo.

Data yang terkumpul maka dimintakan klarifikasi kepada pembina data. Untuk data sektoral OPD maka pembina data adalah BPS Kabupaten. Jika hasil pemeriksaan telah sesuai sesuai standar Portal Data Indonesia maka dimasukkan portal tersebut dan dilakukan penyebarluasan data yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Portal SDB. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan Portal SDB sudah berorientasi pada legislasi. Karena dapat dilihat pada hasil wawancara dan observasi diatas bahwa dalam pelaksanaan SDB mulai dari pengumpulan hingga penyebarluasan data sudah dibuat pedomannya secara runtut mulai dari Perpres sampai dengan Perbub kabupaten Bojonegoro

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Portal SDB berdasarkan hasil wawancara, observasi dokumentasi sebagai layanan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dilihat teori penerapan menurut Maskun dalam labolo (2008:369-371) mempunyai empat dimensi yaitu berorientasi pada kebijaksanaan, berorientasi pada lingkungan, berorientasi pada kemajuan teknologi, dan berorientasi pada legislasi. Pada dimensi

berorientasi pada teknologi masih terdapat kurang meratanya kekuatan jaringan internet di Bojonegoro serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui terkait Portal SDB. Namun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik dalam mendukung pelaksanaan Portal SDB, hal tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2021 Tentang Satu Data Bojonegoro sebagai dasar dan petunjuk dalam pelaksanaan SDB di Bojonegoro. Kemudian keputusan pemerintah kabupaten dengan pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Bojonegoro, kegiatan Rapat Koordinasi SDB, Kegiatan pelatihan operator dan/ atau pejabat pengelola data dan informasi PD dan Desa, Diskominfo juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bojonegoro merupakan wujud dari dukungan dalam penerapan SDB

Kendala pada program ini seperti halnya temuan Ani Adiwinata Nawir (2019) berjudul Studi Analisis Implementasi Open Data Untuk Meningkatkan Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Open Data di DKI Jakarta belum maksimal diakibatkan akibat kelembagaan masih terlalu kaku untuk mengadopsi struktur vertikal, sehingga tanggung jawab kelembagaan dan arah kebijakan disesuaikan dengan arah vertikal, yang tidak cocok karena kolaborasi membutuhkan kerja atau organisasi horizontal, namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu seringkali menghadapi kendala pada aspek kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang kurang merata dalam memahami teknologi informasi dan komunikasi.

Secara keseluruhan penerapan SDB dapat dinilai cukup baik, hal tersebut seperti halnya hasil dari penelitian Nur Afiah Maizunati (2018). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi portal data di Kota Magelang dinilai sudah cukup baik, namun tersapat kekurangan dimana adanya bounce rate (persentase pengunjung yang langsung meninggalkan website setelah membuka satu halaman saja) yang tinggi dan rata-rata waktu akses yang rendah perlu diperhatikan demi optimalnya kepuasan pengguna. Kualitas bahan portal harus ditingkatkan dengan tetap menjaga validitas data yang tersedia untuk umum dan meningkatkan partisipasi aktif dari pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun data terbuka yang komprehensif, representasi, ramah pengguna dan aman.

Permasalahan dalam pelaksanaan SDB hampir serupa dengan penemuan dari Krisdianto (2021) yang mana masih terdapat masyarakat yang belum bisa atau bahkan belum mengetahui terkait dengan program yang ada. Kebanyakan orang tua malas belajar menggunakan smartphone dan komputer padahal untuk belajar mengoperasikan benda tersebut sangatlah mudah tetapi para orang tua saja yang malas untuk mempelajarinya.

#### IV. KESIMPULAN

Penerapan Satu Data Bojonegoro oleh Diskominfo Kabupaten Bojonegoro belum optimal, hal tersebut diakibatkan kurang meratanya kualitas jaringan internet di kabupaten bojonegoro dan sebagian dari masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui apa itu portal SDB. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan adanya pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Bojonegoro, dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi, dan telah dilaksanakan kegiatan pelatihan operator dan/ atau pejabat pengelola data dan informasi PD dan Desa, Diskominfo juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bojonegoro.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori penerapan dari Maskun dalam Labolo.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program portal Satu Data Bojonegoro untuk menemukan hasil yang lebih mendalam..

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bappenas. (2021). Prinsip Satu Data Hasilkan Data yang Akurat Bagi Pembangunan. <https://www.bappenas.go.id/>
- Dimas Jarot Bayu. (2020). Implementasi Program Satu Data Indonesia Terganjil Berbagai Kendala. <https://katadata.co.id/>
- Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Akuntansi, 1–10.
- “Hasil Tes Kecepatan Jaringan Internet” Retrieved maret 6, 2022, from <https://www.indotelko.com>
- Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Muhaimin, Suti’ah, dan S. L. P. (2009). Manajemen Pendidikan. Jakarta. Kencana.
- Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (Cet.32). Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadam Labolo dkk. (2008). Beberapa pandangan dasar tentang ilmu pemerintahan. Malang. Bayumedia Publishing.
- Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu
- Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2021 Tentang Satu Data Bojonegoro.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Riyanto, G. P. (2021). Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202Juta. <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.
- Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro 2018-2023
- Setiawan, R. (2009). Penggunaan Internet Sebagai Teknologi Informasi Di Kalangan Mahasiswa Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Yusuf. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta. Prenadamedia group.
- “Tentang Satu Data Indonesia.” (n.d.). Retrieved September 6, 2021, from [data.go.id](https://data.go.id)